

[Eks-HTI Penuh Manipulasi: Melintir Pidato Mbah Wahab hingga Mencatut Prof Ahmad Zahro](#)

Ditulis oleh Ainur Rofiq Al Amin pada Sunday, 23 August 2020


Alliansi Muslim Peduli Ummah

AHLI FIQIH BICARA KHILAFAH

”
Saya itu belajar fiqh sepanjang umur, sejak anak-anak sampai sekarang menjadi GURU BESAR FIQH, sudah membaca RATUSAN KITAB FIQH LINTAS MADZHAB, amat tidak asing dengan istilah KHILAFAH

Semua madzhab menegaskan adanya ajaran Khilafah dalam Islam

Jadi umat Islam tidak boleh alergi dengan Khilafah, karena Khilafah itu maknanya adalah pemerintahah dalam persektif Islam

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA
Guru Besar Ilmu Fiqh Universitas Islam



Saya tegaskan, jejak khilafah dalam kitab kuning pasti lebih “mutawatir” tinimbang jejak khilafah secara historis lalu dibuat film. Sebenarnya hampir seluruh pewaris kitab kuning alias santri juga tahu itu dan tidak mengingkarinya.

Saya kutipkan bagaimana al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sultaniyyah* yang tebalnya 262 halaman saya hitung secara cepat (bisa jadi ada yang kelewatan karena hitunganya

manual) kata “khilafah” sebanyak 35 kali, kata “khalifah” 25 kali, kata “imamah” sebanyak 94 kali dan kata “imam” sebanyak 13 kali. Pun demikian kitab *Fathul Wahhab* karya Syaikh Zakaria Al Ansori atau kitab *Rawdhat al-Thalibin wa ‘Umdat al-Muttaqin karya al-Nawawi, Minhajut Thalibin karya al-Nawawi, Asna al-Mathalib dan Minhajut Thullab karya Syaikh Zakariya al-Anshari, Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar al-Haytami, Mughnil Muhtaj karya Ahmad al-Khathib al-Syarbini, Nihayatul Muhtaj karya al-Ramli dan lain-lain. Maka naif bila eks HTI menyebarkan poster Prof. Zahro bahwa kajian khilafah memang sejak dahulu kala, tentu terlepas itu ucapan Prof. Zahro atau bukan, memang benar bahwa para akademisi studi Islam dan para santri sudah tahu tentang wacana khilafah dalam turats muslim.*

Berbeda dengan jejak historis yang kalau mau jujur, kita harus berkata bahwa klaim berupa keislaman kita karena adanya *khilafah* adalah klaim sepihak dan tidak adil. Karena memang masuknya Islam di Indonesia ada beragam penjelasan.

Buku “Atlas Walisongo” karya Agus Sunyoto menjelaskan hal itu. Atau buku “Peran Dakwah Habaib/Alawiyin di Nusantara” yang di antara kontributornya adalah Habib Luthfi Yahya, Azyumardi Azra, Engsens Ho, Frode F. Jacobsen dan lain-lain. Di dalam buku tersebut dipaparkan ada lebih 20 penelitian tentang sejarah diaspora “habaib Hadramaut” di nusantara seperti karya Aboebakar Atjeh, Edward Alpers, A Gwyn Campbell and Michael Salman, Kazuhiro Arai, Naquib Al Attas, Azyumardi Azra, Van Den Berg, Michael Feener, Ulrike Freitag, Michael Gilsenan, Alwi jin Thahir Al Haddad, Engsens Ho, dan lain-lain.

Choirul Anam dalam buku “KH.Abdul Wahab Chasbullah Hidup dan Perjuangannya” mengatakan,

“Untuk mengetahui sejak kapan Islam masuk dan menguasai nusantara Indonesia? Jawabannya hingga kini masih beberapa versi. Para sejarawan merasa resah jika ditanya: Kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapa yang membawa, wirausahawan (pedagang) atau guru-guru tasawuf. Dari mana asal mereka, dan daerah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam? Problem kapan masuknya Islam ke Indonesia sangat sulit dipastikan oleh karena Indonesia sangat luas, dan letak geografis Nusantara berada di persimpangan jalan laut niaga antara Arab, India dan Cina. Karena itu para sejarawan sendiri masih berselisih pendapat, ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke 11 atau ke 13 M dan dibawa oleh guru-guru tasawuf dari Gujarat. Tapi ada pula yang berpendirian pada abad ke 7 M dan dibawa langsung oleh pedagang-pedagang Arab. Ada lagi yang berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia dari Persi dan bermazhab Syi’ah. Masih banyak lagi teori tentang masuknya Islam ke Nusantara Indonesia.”

Baca juga: Melacak Jejak Syiar Muslim Tionghoa di Indonesia

Anam juga mengutip hasil seminar di Sumatera Utara tahun 1963, mengutip pendapat Van Den Berg, juga pandangan L. Van Rick Vorsel, juga Habib Alwi bin Thahir Al Haddad. Habib Alwi bin Thahir Al Haddad menjelaskan Islam masuk ke Jawa zaman Khalifah Usman bin Affan.

Intinya, Islam masuk Nusantara memang beragam pendapat baik tahun, lokasi pulau yang dimasuki juga profesi pembawa dan asal negara pembawa. Lebih jelas lagi adalah penjelasan Prof Hasimy “Syiah dan Ahlussunnah” mengatakan, “Dari catatan sejarah masuknya Islam ke Aceh dan berdirinya Kerajaan-Kerajaan Islam di sana, dapatlah kita mengetahui bahwa sejak semula Partai Syi’ah dan Partai Ahlus Sunnah telah saling rebut pengaruh dan kekuasaan.” Tentu pendapat Prof A. Hasimy ini memastikan bahwa kalau Syiah pernah berkuasa di Aceh pastinya bukan hanya khilafah yang membawanya tapi ada beragam pembawa Islam ke Nusantara.

Kiai Wahab dan Jejak Khilafah di kitab Kuning

Kembali ke “kitab kuning” dan jejak khilafah. Para kader NU yang hidup sekarang ini ketika memahami teks-teks kitab kuning tentang *imamah* atau *al-imam al-a’zhom* jika tidak melewati konstruksi pemahaman ala KH. Wahab Hasbullah, maka akan mudah tertarik untuk ikut memperjuangkan khilafah ala eks-HTI.

Perlu diketahui, Mbah Wahab dalam pidatonya di parlemen pada tanggal 29 Maret 1954 yang dimuat dalam majalah Gema Muslimin dengan judul, “Walijjul Amri Bissjaukah” mengatakan:

Baca juga: Sejarah Dinasti Al-Murabithun, dari Dakwah Islam ke Gerakan Politik

“Saudara2, dalam hukum Islam jang pedomannja ialah Qur’an dan Hadits, maka di dalam kitab2 agama Islam Ahlussunnaah Waldjama’ah jang berlaku 12 abad di dunia Islam, di situ ada tertjantum empat hal tentang Imam A’dhom dalam Islam, jaitu bahwa Imam A’dhom di seluruh dunia Islam itu hanja satu. Seluruh dunia Islam jaitu Indonesia,

Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, mupakat mengangkat satu Imam. Itulah baru nama Imam jang sah, jaitu bukan Imam jang darurat. Sedang orang jang dipilih atau diangkat itu harus orang jang memiliki atau mempunyai pengetahuan Islam jang semartabat mudjtahid mutlak. Orang jang demikian ini sudah tidak ada dari semendjak 700 tahun sampai sekarang.... Kemudian dalam keterangan dalam bab jang kedua, bilamana ummat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A'dhom jang sedemikian kwaliteitnja, maka wadjib atas ummat Islam di-masing2 negara mengangkat Imam jang darurat. Segala Imam jang diangkat dalam keadaan darurat adalah Imam daruri.....Baik Imam A'dhom maupun daruri, seperti bung Karno misalnja, bisa kita anggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara, ialah Walijjul Amri.”

Pidato Mbah Wahab di atas setidaknya dapat ditarik tiga pemahaman:

Pertama, bahwa mengangkat kepemimpinan tunggal dalam dunia Islam baik yang disebut dengan *imamah* maupun *khilafah* sudah tidak mungkin lagi karena syarat seorang *imam* yang setingkat mujtahid mutlak menurut Mbah Wahab sudah tidak ada lagi semenjak 700 tahun sampai sekarang.

Kalau pidato Mbah Kiai Wahab itu pada tahun 1954 maka bila dikurangi 700 tahun hasilnya sekitar 1250-an Masehi, masa itu memang masa keruntuhan dinasti Abbasiyyah atau masa kemunduran Islam. Tahun 1250 adalah masa akhir periode klasik sejarah perkembangan peradaban Islam. Setelah masa itu dalam perspektif Kiai Wahab Chasbullah sudah tidak ada lagi orang berkaliber Mujtahid yang merupan syarat untuk menjadi imam a'dzam.

Kedua, dari pidato tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa presiden Indonesia berikut NKRI adalah sah secara hukum Islam.

Ketiga, pidato ini sekaligus menafikan pendapat bahwa Mbah Wahab bercita-cita menegakkan kembali khilafah dengan membentuk komite khilafah, karena terbukti Mbah Wahab menjelaskan bahwa sudah 700 tahun tidak ada orang yang setingkat mujtahid untuk menduduki kursi sebagai Imam atau khalifah. Lantas, apa logika Mbah Wahab dengan mengajukan argumen bahwa khilafah sudah tidak mungkin lagi karena syarat seorang imam yang setingkat mujtahid mutlak sudah tidak ada lagi sejak 700 tahun.

Baca juga: Riwayat Perang Terakhir Rasulullah

Kalau kita membuka lembaran “kitab kuning”, semisal *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, situ dijelaskan bahwa *ahlul imamah* (orang yang berkualifikasi menjadi imam) harus memenuhi syarat adil, berilmu yang mampu untuk berijtihad, selamatnya pancaindera dan fisik dari kekurangan, wawasan kepemimpinan yang luas, keberanian dan nasab Quraisy.

Poin tentang berilmu yang mampu untuk berijtihad inilah tampaknya yang dijadikan pijakan Mbah Wahab. Kalau ingin lebih jelas lagi dalam kitab *Fathul Wahhab* langsung tertulis salah satu syarat menjadi *al-imam al-a'dzam*, di antara adalah muslim, mukalaf, merdeka, adil, dan seorang Mujtahid.

Menariknya lagi, dalam pidato tersebut, Mbah Wahab menjelaskan lebih lanjut bahwa karena syarat menjadi *imam a'dhom* (seperti dalam al-Mawardi) sudah tidak terpenuhi, maka Soekarno absah menjadi pemimpin RI dengan gelar *waliyyul amri ad-daruri bissyaukah*. Artinya syarat pemimpin yang ideal diturunkan menjadi syarat minimal realistis. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan lain bahwa Gus Dur yang mempunyai kekurangan fisik juga absah menjadi presiden, karena memang presiden tidak sama dengan *imam a'dhom* sehingga syarat ideal seperti dalam al-Mawardi tidak diperlukan.

Ahmadiyah dan Syiah lebih “Gentle”

Lebih jauh, jejak khilafah atau imamah di kitab kuning maupun di catatan historis tidak bisa langsung sebagai pembenar atas judul film jejak khilafah yang dibuat dan didukung oleh eks-HTI. Karena memang beda pemahaman khilafah dalam kitab kuning dengan apa yang dipahami eks-HTI. Kalau HT bisa mengklaim gegara ada kajian khilafah atau iammah dalam kitab kuning, maka Ahmadiyah dan Syiah juga bisa mengklaim. Namun tampaknya Ahmadiyah dan Syiah lebih “gentle” daripada eks-HTI. Mereka membuat formulasi sendiri tanpa harus mencari pembenar di kitab kuning atau sejarah Walisongo sekedar sebagai legalitas palsu dan menipu umat awam lalu harapannya bisa menjadikan warga NU menjadi anggota mereka.